

**SKRIPSI**  
**PROSEDUR PENETAPAN TAPAL BATAS LAUT ANTAR NEGARA YANG**  
**BERDEKATAN MENURUT *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF***  
***THE SEA* 1982**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada*  
*Fakultas Hukum*

**OLEH**

**GILANG AHDI RAMADHAN**

**1110113059**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL**



**Pembimbing I : Magdariza, SH., MH.**

**Pembimbing II : Zimtya Zora, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**  
**2018**

**No. Reg. 569/VII/III/2018**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**No. Reg. 569/VII/III/2018**

**PROSEDUR PENETAPAN TAPAL BATAS LAUT ANTAR NEGARA YANG  
BERDEKATAN MENURUT *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF  
THE SEA* 1982**

**Disusun oleh:**

**GILANG AHDI RAMADHAN**

**1110113059**

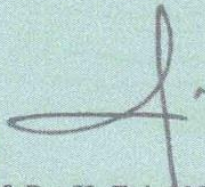
*Telah dipertahankan di depan Tim Penguji*

*Pada tanggal 26 Juli 2018*

*Yang bersangkutan dinyatakan LULUS oleh Tim Penguji*

*Yang terdiri dari:*

**Dekan**



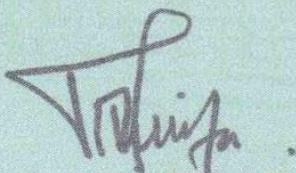
**Prof. Dr. H. Zainul Daulay, S.H., M.H.**  
NIP. 195911221986031002

**Wakil Dekan I**



**Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197106301998021002

**Pembimbing I**



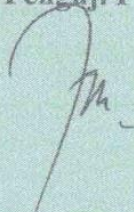
**Magdariza, SH., MH.**  
NIP. 196210241989012002

**Pembimbing II**



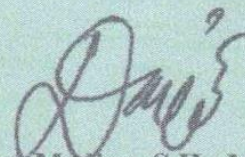
**Zimtya Zora, S.H., M.H.**  
NIP. 197908172006042001

**Penguji I**



**Dr. Najmi, SH, MH.**  
NIP. 195904081986031003

**Penguji II**



**Davu Medina, S.H., M.H.**  
NIP. 198412112009122004



No. Alumni Universitas	Gilang Ahdi Ramadhan	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/Tgl Lahir: Bekasi /22Maret 1992	f) Tanggal Lulus: 26 Juli 2018	g) Predikat Lulus: Memuaskan
b) Nama Orang Tua: Yundra Ahdi dan Rina Srifatmon	h) IPK: 3,07	i) Lama Studi: 6 Tahun 10 Bulan
c) Fakultas: Hukum	j) Alamat: Jalan Cemara IV No 13 Pondok Hijau Permai, Rawalumbu , Bekasi Timur.	
d) PK: Hukum Internasional (PK VII)		
e) BP: 1110113059		

***DETERMINATION PROCEDURE FOR STATE ANALYSIS OF THE COUNTRIES AROUND THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982***

(Gilang Ahdi Ramadhan, 1110113059, Fakultas Hukum, Universitas Andalas)

Pembimbing: Magdariza SH, MH,. Zimtya Zora SH, MH.

***Abstrak***

Hukum laut merupakan cabang hukum internasional. Semenjak berakhirnya perang Dunia II, hukum laut mengalami revolusi atau perubahan-perubahan mendalam sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Praktik masyarakat internasional membuktikan bahwa laut merupakan wilayah yang kompleks dan menimbulkan banyak permasalahan dalam pengukuran batas wilayahnya. Oleh karenanya Hukum Internasional mengatur secara tersendiri wilayah laut dan pemanfaatannya di dalam *United Nations Convention Of The Law On The Sea* tahun 1982 (Selanjutnya disebut UNCLOS 1982). Karena itu pentingnya penetapan tapal batas antar negara untuk mempertahankan kedaulatan (*souvereignty*) dan hak-hak berdaulat (*souvereign rights*) antar negara serta menyelesaikan semua persoalan yang berkaitan dengan hubungan internasional, negara perlu menetapkan perbatasan wilayah baik dimensi perbatasan darat maupun perbatasan laut dan udara. Kasus penetapan batas wilayah laut antara Australia dan Timor Leste. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan tipologi hukum yang digunakan dalam metode ini adalah pendekatan deskriptif, jenis data sekunder, serta analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan Penetapan garis batas wilayah teritorial diatur dalam Pasal 15 Konvensi Hukum Laut 1982 yang menyatakan dalam hal pantai dua negara yang berhadapan satu sama lain, tidak satupun di antaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur. Serta kasus Australia dengan Timor Leste Dalam perundingan tersebut pihak timor Leste berusaha mendapatkan solusi yang adil dan merata mengenai apa yang menjadi hak mereka berdasarkan ketentuan hukum Internasional, karena Perjanjian yang dilakukan antara Timor Leste dan Australia mengenai Laut Timor dianggap tidak valid dan perlu ditetapkan kembali mengenai batas maritime antara kedua Negara karena meskipun terdapat aturan sementara mengenai pembagian sumber daya bersama di Laut Timor, akhirnya Pada Bulan Maret 2018 terjawab sudah tentang penetapan batas wilayah laut anra Australia dengan Timor leste di dalam perjanjian antar dua negara yang melakukan penetapan garis Tengah (*Median Line*).

Skripsi ini telah dipertahankan didepan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Juli 2018  
Penguji,

Tanda Tangan		
Nama Terang	<b>Dr. Najmi SH. MH</b>	<b>Dayu Medina SH. MH</b>

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Internasional: Magdariza, S.H.,M.H

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

	No. Alumni Universitas	Gilang Ahdi Ramadhan	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl Lahir: Bekasi /22Maret 1992	f) Tanggal Lulus: 26 Juli 2018	g) Predikat Lulus: Memuaskan
b) Nama Orang Tua: Yundra Ahdi dan Rina Srifatmon	h) IPK: 3,07	i) Lama Studi: 6 Tahun 10 Bulan	j) Alamat: Jalan Cemara IV No 13 Pondok Hijau Permai, Rawalumbu , Bekasi Timur.
c) Fakultas: Hukum			
d) PK: Hukum Internasional (PK VII)			
e) BP: 1110113059			

***DETERMINATION PROCEDURE FOR STATE ANALYSIS OF THE COUNTRIES AROUND THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982***



(Gilang Ahdi Ramadhan, 1110113059, Fakultas Hukum, Universitas Andalas)

Pembimbing: Magdariza SH, MH., Zimtya Zora SH, MH.

***Abstrack***

*The law of the sea is a part of international law. Since the end of World War II, the law of the sea experienced a revolution or profound changes in accordance with the development and demands of the times. The practice of the international community proves that the sea is a complex area and raises many problems in the measurement of its Territory. Therefore the International Law regulates the marine territory and its utilization in the 1982 United Nations Convention Of The Law On The Sea (hereinafter referred to as UNCLOS 1982). Because of this, the importance of establishing boundaries between countries to maintain sovereignty and sovereignty rights between countries and resolve all issues related to international relations, the state needs to establish territorial borders both in terms of land border and sea and air borders. The establishment of the border zone can be carried out in accordance with international law so as to provide legal certainty, legal benefits and justice for the people who inhabit the border area. Therefore, the discussion put forward in this study, namely the determination of the boundaries of the sea between neighboring countries according to UNCLOS 1982, and the case is a determination of the sea boundaries between Australia and Timor Leste. This research uses normative research methods with legal typology used in this method is descriptive approach, secondary data type, and qualitative analysis. The results of this study include the determination of the territorial boundary line set in Article 15 of the 1982 Sea Law Convention in the case of each other, none of them shall be entitled, except there is a contrary agreement between them, to establish its territorial sea, which is the same distance from the nearest points. As well as the case of Australia with Timor Leste In the negotiations, the Timorese tried to get a fair and equitable solution of their rights under the provisions of international law, because the Agreement between East Timor and Australia regarding the Timor Sea is considered invalid and needs to be re-established on the maritime boundary between the two States because there are provisional rules on the sharing of resources in the Timor Sea. finally In March 2018 was answered already about the determination of maritime boundary between Australia and Timor leste in the agreement between the two countries that make the determination of the Median Line.*

Skripsi ini telah dipertahankan didepan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Juli 2018  
Penguji,

Tanda Tangan		
Nama Terang	<b>Dr. Najmi SH. MH</b>	<b>Dayu Medina SH. MH</b>

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Internasional: Magdariza, S.H.,M.H

  
Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan: